

## **BAB IV**

### **ALASAN IRAN BERSEDIA UNTUK BERUNDING DENGAN NEGARA-NEGARA P5 + 1**

Pada bab yang lalu telah dijelaskan mengenai kondisi dalam negeri Iran yang memiliki tambang minyak, tambang gas alam dan tentunya tambang uranium yang siap untuk diayak. Dari kepemilikan berbagai sumber daya alam inilah Iran memiliki kondisi perekonomian yang baik dan melakukan program pengembangan nukir Iran yang baik, dimana kemudian muncul adanya hadangan dari negara-negara Barat yang mengganggu stabilitas dalam negeri Iran. Setelah melalui berbagai peristiwa dan negosiasi yang panjang, akhirnya Iran menyetujui untuk berunding dengan Iran. Pada bab ini penulis akan menjabarkan apa saja yang mendasari Iran untuk menyetujui berunding dengan negara P5 + 1 sesuai dengan teori pengambilan keputusan luar negeri yang dijelaskan oleh William D. Coplin.

#### **A. Politik Dalam Negeri Iran**

Menguatnya kubu moderat dalam birokrasi Iran pasca menurunnya angka kredibilitas kubu kiri di mata rakyat Iran akibat kegagalan mereka memenuhi janji-janji reformis. Kendati rakyat Iran tidak memungkiri realitas bahwa kubu kanan yang menguasai pilar-pilar kekuatan negara menjadi faktor penghalang terealisasinya program-program reformis, namun rakyat tetap memandang bahwa kubu kiri telah gagal memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan.

Bahkan, seandainya Dewan Garda membatalkan diskualifikasi ribuan kandidat reformis, mereka tidak secara otomatis akan memilih kembali kandidat reformis. Tanda-tanda melemahnya dukungan terhadap reformis juga tampak dalam aksi unjuk rasa para mahasiswa Juni 2003, yang mulai berani menuntut agar Presiden Khatami yang notabene sebagai inspirator gerakan reformis mengundurkan diri karena dinilai lemah menghadapi kubu kanan konservatif (Musthafa, 2003).

Selain itu, terjadinya perpecahan dalam barisan kubu kiri yang terlihat sebelum pemilu parlemen ke-7, tepatnya ketika pemilihan walikota pada 28 Februari 2003 lalu di mana kubu kiri ternyata maju dengan berbagai bendera, tidak lagi di bawah satu bendera yang sama. Akibatnya, secara mengejutkan kubu kanan memenangkan pemilihan wali kota tersebut. Kubu Al Thani Al Khordad yang selama ini menjadi payung semua faksi kiri beraliran reformis dianggap tidak relevan lagi menjadi wadah politik bagi semua faksi kiri. Faksi kiri radikal, khususnya Front Partisipasi Islam (IIPF) yang secara terang-terangan menggugat sistem *Velayat-e Faqih* kini dianggap menjadi beban politik Al Thani Al Khordad dan dalam pemilu parlemen kali ini, kubu kiri diwakili oleh *Coallition for Iran* yang memayungi delapan kelompok reformis yang tidak turut serta memboikot pemilu.

Ketidakkompakan kubu reformis pun diakui oleh Mohammad Reza Khatami yang turut serta dalam aksi boikot bahwa masalah utama yang dihadapi gerakan reformasi saat ini adalah kurangnya organisasi dan partai yang kuat. Oleh karena itu langkah keluar dari Majelis dan keluar dari pusat kekuasaan merupakan kesempatan bagi reformis untuk melakukan reorganisasi partai (Ray, 2003).

Berubahnya kondisi politik dalam negeri Iran ditandai dengan keinginan kubu kanan menguasai kembali lembaga

legislatif dan eksekutif. Kubu kanan sangat cemas melihat terus meningkatnya pengaruh kubu kiri dalam kehidupan politik Iran dewasa ini. Keberhasilan kubu kiri menguasai lembaga eksekutif dan legislatif dan senantiasa mendengungkan reformasi ke telinga rakyat melalui corong media massa, membuat kubu kanan mengambil langkah keras demi meredam langkah reformis yang mereka anggap membahayakan kelestarian ideologi revolusi islam. Kubu kiri pula yang menggulirkan isu normalisasi hubungan dengan AS, yang bagi kubu kanan merupakan sebuah isu yang tabu untuk dibicarakan. Sehingga kubu kanan terus membangun opini bahwa kontak dengan AS dapat mengancam eksistensi Republik Islam Iran dan peran kaum Mullah di Iran.

Sikap kubu kanan ini terlihat tatkala Ayatollah Jannati, Ketua Dewan Garda, menegaskan bahwa meski Iran bersedia menerima bantuan kemanusiaan dari AS atas musibah gempa bumi di kota Bam, namun hal itu bukan berarti hubungan kedua negara otomatis membaik. Oleh karena itulah, penting bagi kubu kanan untuk menguasai kembali lembaga legislatif demi memuluskan jalan bagi kandidat konservatif memenangkan pemilu presiden di tahun mendatang. Hal ini sangat memungkinkan mengingat masa jabatan dan kesempatan Mohammad Khatami menjadi presiden akan berakhir. Di samping itu tidak ada kandidat kubu kiri yang kuat selepas Khatami. Sementara itu, kubu kanan telah menyiapkan calon kuatnya untuk pemilu presiden 2005, yakni Dr. Mir Husein Musavi (mantan PM Iran di era 1980-an) yang bukan dari kalangan Mullah dan tampaknya hal ini mengindikasikan bahwa kaum mullah konservatif secara perlahan mulai menarik diri dari panggung politik Iran, agar tidak terlihat secara frontal menguasai posisi-posisi strategis meski secara ril politik mereka tetap sebagai “penguasa” di belakang layar. Sikap kubu kanan yang kini juga mengangkat slogan-slogan reformasi, khususnya

reformasi di bidang ekonomi yang selama ini bukan menjadi prioritas utama kubu kiri. Selama tujuh tahun terakhir, kubu kiri lebih memprioritaskan reformasi politik ketimbang ekonomi.

Sementara itu, kaum muda dan kalangan menengah kota telah mengalami frustrasi akibat kondisi ekonomi yang stagnan dan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Realitas inilah yang kemudian digarap oleh kubu kanan dan menjadi slogan reformasi mereka dalam kampanye pemilu dengan menggunakan nama Abadgaran atau Koalisi untuk Pembangunan Iran Islami (*the Coallition on Developers of Islamic Iran*) (kartini, 2004). Dengan slogan tersebut, kubu kanan mencoba meyakinkan rakyat agar mengesampingkan pertikaian faksional dan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk kembali bekerja dan tampaknya strategi kubu kanan pun membawa hasil yang signifikan terbukti dengan kemenangan mereka dalam pemilu wali kota dan pemilu parlemen pada 2004.

Kekalahan kubu kiri dalam pemilu parlemen kali ini tentu saja mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuatan dalam peta politik Republik Islam Iran. Realitas politik Iran tujuh tahun belakangan ini menunjukkan kekuatan kubu kiri mulai mengimbangi kekuatan kubu kanan dengan dikuasainya lembaga eksekutif dan yudikatif. Namun, saat ini peta politik Iran kembali diwarnai oleh dominasi kubu kanan (pragmatis) di setiap pilar pemerintahan Republik Islam Iran. Realitas ini tentu saja mengundang kekhawatiran tidak hanya publik Iran tapi juga dunia internasional. Akankah Republik Islam Iran kembali menampilkan “wajah garangnya” seperti masa Imam Khomeini dan membawa Iran kembali terisolasi dari dunia internasional? Kendati kekhawatiran tersebut cukup beralasan, namun tampaknya kita tidak bisa menafikan adanya angin perubahan di republik Islam sepeninggal Pemimpin Besar revolusi Islam

Imam Khomeini, khususnya semenjak Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menjadi presiden hingga masa Khatami saat ini.

Doktrin reformasi yang dikampanyekan Khatami bersama kubu kiri juga telah mempengaruhi pemikiran kubu kanan. Sehingga dapat diungkapkan bahwa pemikiran reformis telah diterima oleh bangsa Iran secara luas, termasuk kalangan konservatif. Realitas ini disadari penuh oleh kubu kanan, sehingga anggota parlemen dari kubu kanan yang terpilih dalam pemilu parlemen ke-7 menegaskan bahwa mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Khatami di mana Khatami diyakini tetap membawa pengaruh moderasi di kalangan konservatif (kartini, 2004).

Bahkan, banyak kalangan yang meyakini bahwa kubu kanan telah memberi sinyal positif dan menunjukkan itikad baik untuk menjadi bagian dari komunitas internasional. Hal ini sangat penting mengingat dalam kampanye pemilu parlemen ke-7, mereka menjanjikan reformasi ekonomi khususnya menciptakan lapangan kerja bagi ribuan kaum muda Iran, keadilan sosial dalam hal pemberantasan korupsi, serta kebebasan politik khususnya di lingkungan universitas sekaligus menepis rumor bahwa parlemen baru yang terbentuk justru akan mengekang kebebasan politik. Mengingat kemajuan ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan kali ini, maka itu berarti pemerintah Iran membutuhkan investasi besar yang mustahil dilakukan tanpa bantuan investasi asing. Sehingga bukan tindakan yang bijaksana apabila pemerintah Iran saat ini mengasingkan diri dari komunitas internasional (kartini, 2004).

Oleh karena itu harapan rakyat Iran saat ini digantungkan kepada sayap kanan konservatif yang lebih moderat, pragmatis, berpendidikan, dan profesional, maupun sayap kanan reformis yang kemungkinan besar dapat muncul

sebagai kekuatan politik baru, yakni kelompok tengah yang diharapkan mampu menyelamatkan gerakan reformasi di Iran. Tanpa menafikan besarnya peran revolusi Islam bagi bangsa Iran, tentunya kembali ke masa revolusi bukanlah pilihan rasional bagi bangsa Iran saat ini. Karena dalam evolusi kehidupan demokrasi di Iran saat ini, bangsa Iran berada pada "*point of no return*" dimana reformisme merupakan pemikiran sekaligus gerakan masa depan Iran yang tentunya diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus disilusi rakyat Iran (kartini, 2004).

Dampak besar dari berubahnya sistem politik di Iran terjadi ketika Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden Iran pada 2013, Rouhani dengan latar belakang pendidikan barat dan berupaya mengembalikan kepercayaan AS dan negara Uni Eropa mengenai program nuklir Iran. Rouhani memulai dengan melakukan diplomasi terhadap dunia internasional mengenai program nuklir Iran pada sidang umum PBB tahun 2013 (Kurnia, 2016).

Rouhani dengan idiosinkratik yang lemah lembut dan kebabakan mampu menyampaikan poin-poin dan posisi Iran dengan cara yang sangat diplomatis, dengan isi yang tetap konsisten akan tujuan yang ingin dicapai Ahmadinejad yaitu menunjukkan posisi kontra terhadap zionisme, khususnya Israel dalam mengatur agenda Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman atas Iran yang mengembangkan teknologi nuklir. Ia sangat menyayangkan tindakan ekonomi koersif dan berbagai kebijakan militer lainnya terhadap Iran. Namun, hal-hal ini ia sampaikan tanpa membuat Israel tersudutkan dengan tindakan-tindakan koersif-verbal seperti yang dilakukan Ahmadinejad dengan mengutip perkataan Ayatollah Khomeini untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Sekalipun Rouhani tidak pernah menyebutkan kata Israel

dalam pidatonya. Ia sangat menjunjung nilai-nilai perdamaian seperti yang dipaparkan dalam pidatonya seperti berikut:

*“Iran seeks to resolve problems, not to create them. There is no issue or dossier that cannot be resolved through reliance on hope and prudent moderation, mutual respect, and rejection of violence and extremism. Iran's nuclear dossier is a case in point. As clearly stated by the Leader of the Islamic Revolution, acceptance of the inalienable right of Iran constitutes the best and the easiest way of resolving this issue. This is not political rhetoric. Rather, it is based on a profound recognition of the state of technology in Iran, global political environment, the end of the era of zero-sum games, and the imperative of seeking common objectives and interests towards reaching common understanding and shared security”* (Kurnia, 2016).

Dalam posisi strategi diplomatik Iran dibawah Menlu Javad Zarif, Iran mengupayakan sebuah dialog internasional yang dilakukan melalui PBB sebagai wadah multilateral dan dengan sasaran negara-negara P5 + 1 yang meliputi Perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman, China, Perancis, Inggris dan Rusia serta Iran juga mengumpulkan kekuatan melalui memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki posisi yang sama akan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai.

Hal ini terbukti signifikan dengan kualitas performa diplomatik Javad Zarif dan Hasan Rouhani yang memiliki kesepihakan visi dalam upaya diplomasi nuklir Iran, Rouhani berhasil memperjuangkan hak-hak pengembangan teknologi

nuklir Iran dan menurunkan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara P5+1 melalui *Joint of Action of Geneva Interim Agreement on Iran Nuclear Program* pada tanggal 20 November 2013 setelah sebelumnya melakukan negosiasi di tanggal 7 dan 8 November 2013 di Jenewa (Kurnia, 2016).

Perjanjian ini mencakup pemenuhan syarat yang diberikan negara P5+1 kepada Iran untuk mendapatkan hak pengembangan nuklirnya meliputi, program nuklir Iran harus diawasi ketat komunitas internasional, Iran harus menghentikan perngayaan uranium, dikurangnya stok bahan nuklir Iran dan ditutupnya fasilitas nuklir Iran di wilayah Arak. Sebagai timbal baliknya untuk Iran, sanksi ekonomi yang terdahulu pernah diterapkan akan diganti rugi sebanyak US\$ 7 Miliar dan jaminan tidak akan dijatuhkannya sanksi ekonomi kembali kepada Iran.

Perjanjian interim ini akan berlangsung pada 6 bulan terakhir ini untuk melihat perkembangan komprehensif dari perkembangan nuklir Iran dan pengaruhnya pada dinamika internasional. Perjanjian ini pun memberikan izin kepada Iran untuk lepas dari sanksi di sektor *auto-industry* dan izin instalasi suku cadang untuk keamanan penerbangan sipil Iran pun sudah dikeluarkan oleh dunia internasional. Iran merespon terhadap permintaan non-proliferasi nuklir dengan jaminan penurunan pengayaan uranium sebesar 20% dalam waktu satu sampai dua bulan ini. Perihal instalasi di Arak tidak akan ditingkatkan kapabilitasnya namun konstruksi pembangunan akan tetap diteruskan dan hasil negosiasi ini disepakati oleh seluruh pihak. Sekalipun mendapatkan berbagai kecaman dari Israel khususnya karena penolakan atas realitas bahwa dunia Barat, bahkan Amerika Serikat, sudah melunak dengan diplomasi Rouhani, kesepakatan ini tetap diterapkan per 20 Januari 2014 (Kurnia, 2016).

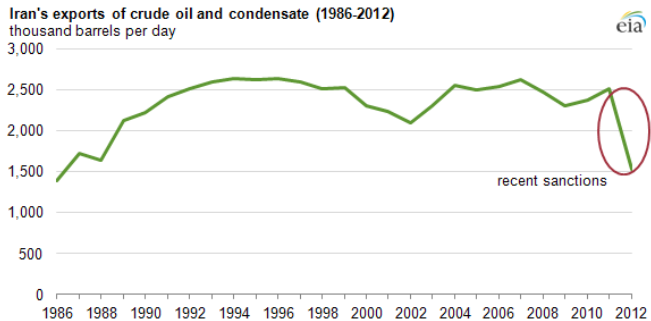


## **B. Keadaan Ekonomi Iran Sesudah Embargo**

Setelah mendapatkan beberapa sanksi ekonomi baik dari UN, EU, dan AS ekonomi Iran berada dalam posisi yang buruk dimana penurunan dari pendapatan negara, meningkatnya angka inflasi hingga meningkatnya angka pengangguran di Iran yang mengakibatkan terjadinya demo di ibukota Iran Teheran. Sebelum sanksi atas program nuklir Iran, negara tersebut menduduki peringkat kedua dengan tingkat perekonomian tersebsar di Timur-Tengah dan Afrika Utara dengan GDP yang mencapai US\$ 598 miliar pada tahun 2012 meskipun perekonomian Iran hanya bergantung pada minyak dan gas yang menyumbang hampir 50 persen pendapatan negara dan 74 persen dari ekspor pada 2010 (Ilias, 2010).

Kemudian saat AS dan EU memperketat sanksi terhadap Iran dengan mengincar sektor minyak Iran yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor tersebut, pada tahun 2011 pendapatan Iran dari ekspor minyak berjumlah 95 miliar dolar dan menurun pada tahun 2012 menjadi 69 miliar dolar. Hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi Iran yang mana ekspor minyak menyumbangkan 80 persen pendapatan ekspor Iran dan 50 persen pendapatan negara. Selain itu, sanksi juga mempengaruhi investasi di sektor minyak dimana banyaknya pembatalan-pembatalan proyek baru oleh beberapa perusahaan asing pada pertengahan 2011 dan 2012 (EIA, sanctions reduce Iran's oil export and revenues in 2012, 2013).

## Bagan 1 Ekspor Minyak Iran (1986 - 2012)

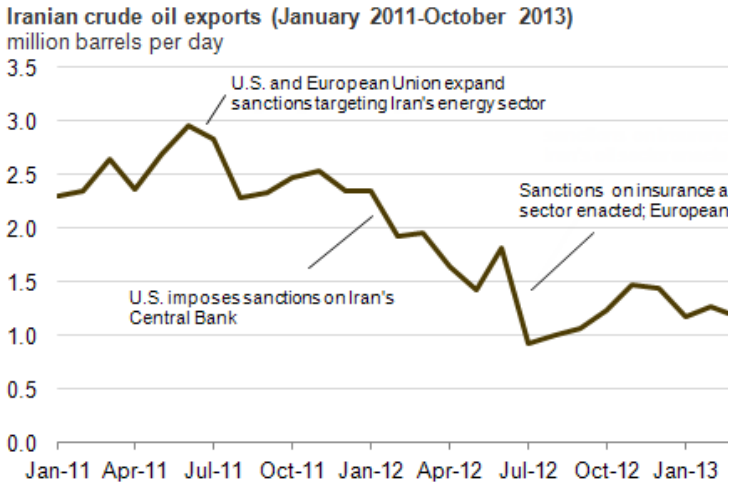


Sumber: (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013)

Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa dengan berlakunya sanksi ekonomi bagi Iran berpengaruh terhadap angka ekspor minyak Iran dimana angka tersebut berada pada titik terendah sejak tahun 1986 pada tahun 2012.

Selanjutnya angka produksi dan ekspor minyak Iran juga terus mengalami kemunduran hingga akhir tahun 2013 dimana produksi minyak Iran hanya berada di angka 2,8 juta barel per hari dan ekspor minyak mentah hanya sebesar 1,1 juta barel per hari (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013).

## Bagan 2 Ekspor Minyak Iran (2011 – 2013)



Sumber: (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013)

Kemudian angka dari produksi dan ekspor minyak Iran juga mengalami penurunan sejak sanksi dari dunia internasional terhadap Iran berlaku dari bulan Juli 2011 sampai Juni 2012 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 ke angka 0,5 juta barel per hari.

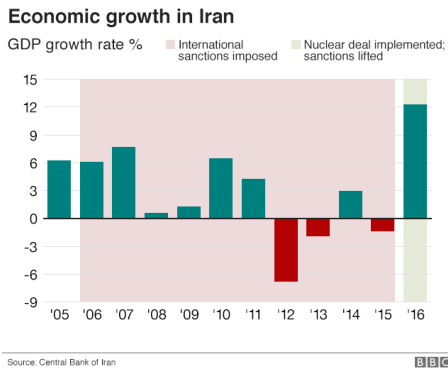
Selain menurunnya produksi dan ekspor minyak Iran setelah adanya sanksi ekonomi, angka pembelian minyak oleh negara pembeli utama juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari total pembelian 2,5 juta barel per hari pada tahun 2011 menjadi 1,27 juta barel per hari pada tahun 2012 (Widya fitri, 2013).

**Tabel 1 Pembeli Minyak Iran (Widya fitri, 2013)**

No	Negara/Blok	2011	2012
1	Uni Eropa (Italia, Spanyol, dan Yunani)	600.000	Diabaikan
2	Cina	550.000	380.000
3	Jepang	325.000	170.000
4	India	320.000	28.000
5	Korea Selatan	230.000	180.000
6	Turki	200.000	150.000
7	Afrika Selatan	80.000	0
8	Malaysia	55.000	30.000
9	Srilangka	35.000	20.000
10	Taiwan	35.000	20.000
11	Singapura	20.000	15.000
12	Lainnya	55.000	25.000
	Total	2,5 juta	1,27 juta

Dengan menurunnya angka produksi dan ekspor minyak Iran berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara Iran, setelah beberapa sanksi dari AS dan EU mengincar sektor minyak Iran, pendapatan negara Iran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan ekonomi Iran berada pada titik terendah pada tahun 2012 dan 2013 (BBC, 2018).

### Bagan 3 Pertumbuhan Ekonomi Iran



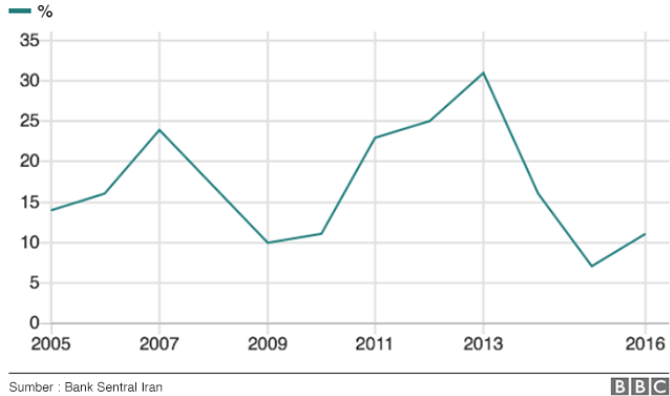
### Sumber: (BBC, 2018)

Kemudian ekonomi Iran semakin memburuk dengan meningkatnya angka inflasi pada 2013 yang mencapai 31 persen yang membuat mata uang Iran terdevaluasi lebih dari 450 persen (BBC, 2018).

## Bagan 4 Angka Inflasi Iran

### Kenaikan harga-harga di Iran

Rata-rata inflasi berfluktuasi tajam dan berada di atas 10%



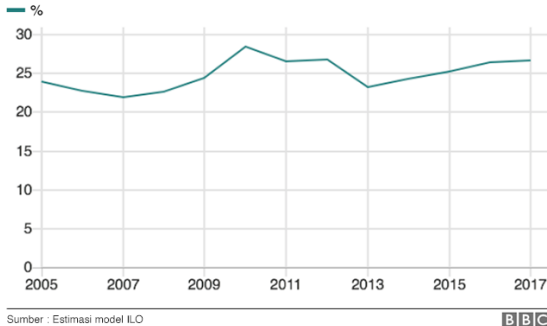
Sumber: (BBC, 2018)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka inflasi kemudian menurun pada 2015 dengan adanya beberapa negosiasi yang dilakukan dengan dewan keamanan PBB dalam masalah pengayaan uranium di Iran. Dengan tingkat inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, mengakibatkan kenaikan dari angka pengangguran di Iran. Angka pengangguran di Iran mencapai 12,4 persen dan berada pada angka 60 di beberapa wilayah menurut Abdolreza Rahmani-Fazli menteri dalam negeri Iran (BBC, 2018).

## Bagan 5 Angka Pengangguran Iran

### Kaum muda sulit menemukan pekerjaan

Persentase pengangguran warga Iran usia 15-24



Sumber: (BBC, 2018)

Dari bagan diatas bisa dilihat angka pengangguran berada pada level tertinggi pada beberapa tahun terakhir ketika sanksi atas program nuklir Iran diberlakukan dimana masyarakat Iran dalam usia produktif susah mendapatkan pekerjaan.

### C. Tekanan Internasional

Banyaknya sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran oleh dunia internasional yang berdampak pada kondisi ekonomi di negara tersebut menjadikan Iran mencoba mengupayakan negosiasi-negosiasi mengenai program nuklirnya. Salah satu tekanan dari dunia internasional yaitu *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and divestment Act (CISADA)* pada 2010 yang merupakan kelanjutan dari *Iran Sanctions act (ISA)* tahun 1996 dengan dukungan dari EU, Inggris, dan Kanada dengan tujuan untuk menekan Iran agar

bersedia melakukan perundingan nuklir terkait dengan kekhawatiran dunia internasional mengenai NPT dan IAEA (treasurygov, 2010).

Dalam CISADA terhadap empat point penting yang memberikan tekanan terhadap pemerintah Iran untuk melakukan negosiasi mengenai masalah nuklirnya, dari ke empat poin tersebut tekanan terhadap Iran berada pada sektor ekonominya dimana beberapa sanksi akan dijatuhkan kepada perusahaan atau individu yang melakukan bisnis dengan Iran.

Poin pertama menekan mitra-mitra Iran yang telah bekerjasama di bidang energi dengan jatuhnya sanksi dari AS dan pendukung CISADA, diantaranya yaitu:

1. Melakukan investasi yang secara langsung dan signifikan berkontribusi untuk pengembangan kemampuan dan pembangunan sumber daya petroleum Iran sebesar 20 juta dolar atau lebih dan menanamkan 5 juta dolar tiap investasi dengan total 20 juta dolar selama 12 bulan.
2. Menjual, menyewakan atau menyediakan barang-barang dan jasa yang secara langsung dan signifikan memfasilitasi pemeliharaan atau ekspansi produksi domestik petroleum Iran sekitar 1 juta dolar atau lebih atau agregat harga pasar senilai 5 juta dolar atau lebih dalam 12 bulan.
3. Menjual atau menyediakan produk olahan minyak bumi untuk Iran.
4. Menyediakan benda-benda atau jasa-jasa yang secara langsung dan signifikan berkontribusi untuk pengembangan kemampuan Iran dalam mengimpor produk olahan minyak bumi (treasurygov, 2010).



Kemudian poin kedua dari CISADA yaitu mengatur tentang *Divestment from Certain Companies that Invest in Iran* bagian termasuk ketentuan finansial CISADA yang memberikan kewenangan kepada departemen keuangan untuk menjatuhkan sanksi atau melarang pembukaan atau menjaga laporan akun keuangan dan institusi keuangan yang tertangkap teridentifikasi:

1. Memfasilitasi usaha pemerintah Iran, termasuk IRGC, untuk mencapai WMD atau sistem pengiriman untuk WMD atau membantu terorisme internasional.
2. Memfasilitasi kegiatan seseorang yang berhubungan dengan Iran yang berkenaan dengan sanksi keuangan di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB.
3. Memfasilitasi transaksi yang signifikan atau memberikan jasa keuangan yang signifikan untuk IRGC atau agen yang memiliki properti dan kepentingan di bawah blokir *International Emergency Economic Power Act* (IEEPA) atau lembaga keuangan yang memiliki properti dan kepentingan yang berada di bawah blokir IEEPA dan berhubungan dengan proliferasi WMD Iran atau sistem pengiriman untuk WMD atau mendukung Iran untuk terorisme internasional (treasury.gov, 2010).

Selanjutnya poin ketiga dari CISADA membahas mengenai pencegahan pengiriman, re-eksporasi, atau pengalihan barang-barang sensitif ke Iran. Pelarangan ini melingkupi barang-barang yang berasal dari AS yang dikirim ke pengguna akhir di Iran yang identitasnya tidak dapat diverifikasi atau ke entitas di Iran yang melanggar hukum atau peraturan AS, termasuk dengan pengiriman melalui satu atau

lebih negara asing atau menggunakan informasi palsu mengenai negara asal. Kemudian mengatur tentang pelaporan wajib oleh Direktur Intelijen Nasional AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang sensitif mengirimkan teknologi AS secara ilegal ke Iran (treasurygov, 2010). Bagian ini mengandalkan kinerja departemen perdagangan untuk melakukan kontrol dan monitor perdagangan terhadap volume barang-barang dari AS yang berakhir pada penerima yang tidak teridentifikasi, ketidaktepatan ekspor dan re-ekspor dan keengganan atau ketidakmampuan suatu negara untuk bekerjasama dengan AS dalam merespon isu pengalihan kontrol ekspor (treasurygov, 2010).

Bagian terakhir dari CISADA hanya menjelaskan mengenai tanggal berlakunya CISADA yang mulai berjalan 120 hari setelah tanggal berlakunya undang-undang ini dan berakhirnya CISADA adalah 30 hari setelah tanggal dimana presiden menyatakan kepada kongres bahwa pemerintah Iran telah berhenti mendukung tindakan terorisme internasional dan tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu untuk penunjukan sebagai negara yang mendukung terorisme dan Iran telah berhenti melakukan akuisisi, dan pengembangan senjata nuklir, kimia, biologi dan balistik (treasurygov, 2010).

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Iran untuk melakukan diplomasi mengenai program nuklirnya, faktor ekonomi dianggap penulis sebagai salah satu faktor yang paling utama dimulainya diplomasi tersebut terutama setelah beberapa sanksi dari dunia internasional mengarah kepada sektor minyak Iran yang kemudian berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor minyak Iran terhadap beberapa negara pembeli utama. Meskipun tekanan-tekanan datang dari dewan keamanan PBB, EU dan AS, dukungan akan program nuklir Iran didapat dari negara-negara non-blok dan China

dimana ketika sanksi ekonomi berlaku, China merupakan salah satu negara yang konsisten melakukan impor minyak dari Iran.

Dukungan juga didapatkan Iran dari negara-negara non-blok setelah berhasil mengelenggarakan KTT non-blok yang kemudian menjadikan Iran sebagai ketua untuk periode 2012-2015. Kemudian dalam KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Teheran yang didalamnya termasuk dukungan dari negara anggota non-blok terhadap program nuklir Iran yang selama ini dianggap untuk kepentingan damai, sehingga secara tidak langsung melalui KTT tersebut Iran mendapatkan sedikit dukungan terhadap program nuklirnya (MEA, 2012).

Kesepakatan nuklir Iran dengan dewan keamanan PBB terjadi pada tahun 2014 di Wina Austria, dimana isi dari kesepakatan tersebut banyak menguntungkan Iran sendiri dengan pencabutan beberapa sanksi ekonomi, migas, petrokimia, perdagangan dan transportasi yang diterapkan oleh EU dan AS dicabut sekaligus. Selain itu, fasilitas nuklir Iran tetap dipertahankan dan tidak satupun sentrifugal yang disingkirkan. Aktivitas penelitian dan pengembangan semua setrifugal utama dan mutakhir tetap dilanjutkan termasuk R-4, IR-5, IR-6 dan IR-8. Kemudian, embargo senjata terhadap Iran juga dicabut dan diganti menjadi pembatasan dimana Iran diperkenankan untuk mengimpor atau mengekspor sebagian produk senjata (Muhammad, 2015).

Selain tekanan dari AS sendiri, Iran mendapatkan tekanan-tenakan dari negara-negara anggota dewan keamanan PBB yaitu atau P5+1 melalui beberapa resolusi yang memberatkan Iran dimana salah satunya yaitu pemutusan hubungan nuklir Jerman dan Prancis dengan Iran dengan menghentikan pasokan uranium untuk Pusat Penelitian Nuklir Iran (TNRC).

AS dan negara sekutunya terus menghembuskan isu-isu bahwa proyek nuklir sipil Iran hendak diblokkan menjadi proyek senjata nuklir. Meskipun tim inspeksi IAEA mengatakan bahwa tidak ada penyimpangan sedikitpun dari proyek nuklir Iran (Bahgat, 2006). Hal ini senada dengan pernyataan yang ditulis oleh Gawdat Bahgat dalam artikelnya yang berjudul “*Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran*”:

*“Since the mid-1980s, Israel, the United States, and other Western powers have accused that Iran of pursuing nuclear weapons capability. Iranian officials have categorically denied these accusations and claimed that their nuclear program is designed for civilian purposes, not military ones. These accusations and denials have further intensified since the earlier 2000s with the revelation of previously unknown nuclear activities by the Iranian authority”* (Bahgat, 2006).

Kemudian negara-negara P5+1 yang merupakan anggota dari dewan keamanan PBB mengancam dan menentang program nuklir Iran melalui beberapa resolusi yang dibentuk. Resolusi pertama yaitu Resolusi 1696 yang dibentuk pada 2006 berisi tentang upaya yang harus dilakukan Iran untuk meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas, dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran. Iran sempat mengabaikan sanksi resolusi pertama, yakni Resolusi 1696, dengan tidak melaporkan keseluruhan aktifitas pengembangan nuklirnya dan menganggap resolusi tersebut ilegal yang menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi selanjutnya berupa

Resolusi 1737 pada Desember 2006 yang berisi tentang himbauan penegasan atas resolusi sebelumnya kepada Iran dengan batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari dan melarang perdagangan dengan Iran dalam berbagai bidang yang berkontribusi terhadap nuklirnya serta pembatasan lawatan dan pembekuan aset beberapa pejabat terkait program nuklir dan misilnya.

Tekanan terhadap program nuklir Iran berlanjut pada tahun 2007 melalui Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB yang berisi tentang jatuhnya sanksi yang lebih berat kepada Iran yaitu larangan dan pembatasan terhadap Iran terkait jual-beli senjata dan peralatan militer lainnya, pembatasan kunjungan dan pembekuan aset beberapa lembaga dan pejabat Iran, dan seruan untuk tidak membuat komitmen keuangan dengan Iran serta tentang insentif untuk Iran apabila mematuhi peringatan dan seruan PBB dan IAEA.

Resolusi 1803 dan 1835 berisi tentang tuntutan kepada Iran untuk memenuhi tuntutan dari resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya demi membangun kepercayaan dan membuktikan bahwa program nuklir Iran didasari dengan tujuan damai (Kholil, 2014).